

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh
ABDUL RAHMAN YUSUF
NIM : S2117177

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN
BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

ABDUL RAHMAN YUSUF

NIM: S2117177

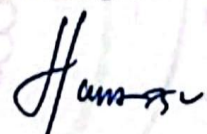
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri, S.E., S.Psi., MM
NIDN : 0002057501

Pembimbing II


Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN: 0930048307

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

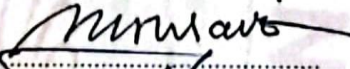

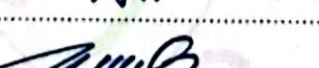

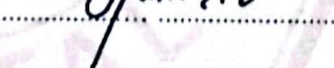
ABDUL RAHMAN YUSUF

NIM: S2117177

SKRIPSI

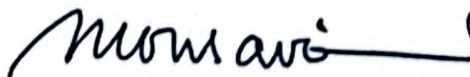
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan di setujui
Oleh tim penguji Pada Tanggal 27 Mei 2024

Komisi Penguji :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si | : |  |
| 2. Purwanto, S.IP., M.Si | : |  |
| 3. Dwi Ratnasari, S.Sos., M.L.Kom | : |  |
| 4. Dr. Bala Bakri, S.E., S.Psi., MM | : |  |
| 5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si | : |  |

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913078602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis (Skripsi) saya ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis (Skripsi) saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan/sitasi dalam naskah dan dicantumkan pula dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma- norma yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo

Gorontalo, 23 mei 2024

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
J. C6CAJX754107353
ABDUL RAHMAN YUSUF

ABSTRAK

ABDUL RAHMAN YUSUF. S2117177. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa. Proses perencanaan mulai dari kegiatan sosialisasi program dan sumber dananya, kemudian dibawa ke kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes), dimana partisipasi warga masyarakat dalam bentuk kehadiran baik langsung atau perwakilan tokoh masyarakat, memberikan masukan berupa saran dan kritikan terkait keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, dimana bentuk partisipasi warga yang paling dominan, yakni tenaga dalam menyelesaikan pembangunan jalan desa. Di samping itu, masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan, yakni dengan memberikan tanggapan tentang keberadaan jalan desa yang dapat memberikan manfaat atau tidak dan kualitas jalan desa.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, jalan desa



ABSTRACT

ABDUL RAHMAN YUSUF. S2117177. COMMUNITY PARTICIPATION IN ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN TALUDUYUNU VILLAGE, BUNTULIA SUBDISTRICT, POHUWATO REGENCY

This study aims to find the community participation in road infrastructure development in Taluduyunu Village, Buntulia Subdistrict, Pohuwato Regency. It employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques in this study apply interviews, observation, and documentation, with data analysis techniques using interactive models. The results of this study indicate that the community has participated in the planning, implementation, and evaluation process of village road infrastructure development. The planning process starts with the socialization of the program and its funding sources, then brought to the village development planning meeting, in which community participation is in the form of direct attendance or representatives of community leaders, providing input in the form of suggestions and criticism related to the overall village road infrastructure development activities. In the implementation of village road infrastructure development, the most dominant form of community participation is labor in completing village road construction. In addition, the community participates in the evaluation of the road infrastructure development, namely by providing feedback on the existence of village roads that can provide benefits or not and the quality of village roads.

Keywords: community participation, infrastructure development, village roads



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul” **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato**. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Taluduyunu.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku penguji pertama; Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku penguji; Dr. Bala Bakri, S.IP., SE, MM, selaku pembimbing I yang banyak memberikan masukan perbaikan untuk skripsi ini; Ibu

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan koreksi perbaikan skripsi ini; Seluruh Dosen, terutama Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan, dan staf administrasi; serta seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Pada akhirnya, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga arahan, masukan dan bimbingan yang diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amiin yang Rabbala Alamin.

Penulis,

ABDUL RAHMAN YUSUF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemerintah	8
2.2 Definisi Pembangunan	14
2.3 Konsep Partisipasi Masyarakat	20
2.4 Konsep Infrastruktur	29
2.5 Penelitian Terdahulu	33
2.6 Kerangka pikir.....	35

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek dan Waktu Penelitian.....	37
3.2 Desain penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitia	42
4.1 Sejarah Desa Taluduyunu	42

4.2 Tugas pokok	44
4.2 Hasil penelitian.....	47
4.2.1 Pembuatan Infrastruktur Jalan Desa Taluduyunu Kec. Buntulia	48
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur jalan desa	49
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa	54
3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa	59
4.3 Pembahasan hasil penelitian	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan.....	68
5.2.Saran	69

Daftar pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa

kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi Masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Desa merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu untuk di jadikan sebagai titik dari sebuah pembangunan. Membangun Desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah di mengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian pembangunan desa harus dijadikan titik sentral pembangunan Nasional. Desa

merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Lahirnya undang-undang tentang desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik. Pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesial.

Menurut Soejono (2002:37) bahwa Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan

pembangunan infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk

terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Taluduyunu, Pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya lahan untuk dijadikan tempat pembangunan yang berakibat Pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan. Berdasarkan pengamatan penulis didapatkan ternyata sudah terjadi beberapa kali kegagalan dalam pembangunan. Permasalahannya adalah tidak ada alokasi dana khusus yang diberikan berupa penggantian untuk lahan masyarakat. Di samping itu, partisipasi masyarakat masih rendah dalam proses pembangunan infrastruktur mulai dari pembuatan keputusan melalui partisipasi dalam pertemuan. Seperti dalam, peggalian gagasan, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Demikian juga dalam evaluasi program infrastruktur seperti memberikan tanggapan terhadap hasil pembangunan infrastruktur melalui musyawarah serah terima kegiatan.

Melihat kondisi di Desa Taluduyunu yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Untuk itu pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya. Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastuktur dan mengangkat judul penelitian:

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

Untuk mengetahui dan menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan akademisi pemerintahan, khususnya kajian akademis yang fokus pada kajian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.
- 2) Manfaat praktis: Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan.

- 3) Keunggulan Metodologis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan kajian penelitian terkait selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemerintah

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

Menurut Kamus umum besar Indonesia Pengertian pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Menurut Poerwadarminta (2003:60) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsional
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan local
- j. Keberagaman dan
- k. Partisipatif

Secara substantif, partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan

suaranya dalam proses pembangunan. Pemerintah, sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumberdaya lokal. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap implementasi otonomi daerah. Tidak terkecuali masyarakat ditingkat desa yang memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, masyarakat desa sangat sadar keberadaan institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam mendorong menegakkan demokrasi pada level akar rumput (masyarakat pedesaan). Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat Community Development sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai

hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan di mana peran pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergi.

Secara umum, ada tiga kendala yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu;

- 1) Instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.
- 2) Banyak LSM-LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat.
- 3) Banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM di era reformasi menyulitkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan mana yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat.

Adapun jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala partisipasi agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat berjalan baik adalah:

- a. Diperlukan instrument hukum yang secara substantif mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas;
- b. Perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah yang peka terhadap kepentingan publik; dan
- c. Masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang terorganisir dan independent yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk baik bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Terkait dengan tugas pokok Pemerintahan maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, namun ada pula beberapa tugas Pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selebihnya merupakan tugas

Pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Daerahnya.

Adapun tugas pokok Pemerintahan menurut Rasyid (2000:58) yaitu mencakup,

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain

yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Selain itu, Rasyid (2000:59) menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh Pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Definisi Pembangunan

Menurut Soetomo (2008:27) Pembangunan yaitu proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut

dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atau tidak.

Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.

Pembangunan desa menempatkan dirinya ke dalam 3 (tiga) sifat, yaitu :

- a. Sebagai metode pembangunan, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha di desa. Masyarakat adalah subyek pembangunan.
- b. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
- c. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik.

Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat

mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi dan Supriyadi (2004:14) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada kesepakatan bahwa: Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Kodoatie R (2003:54-55) bahwa di dalam pembangunan, terkandung begitu banyak pokok-pokok pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan

senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.

- b. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang (akan) harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternative pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan: kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko, yang harus dihadapi.
- c. Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternative-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri (swakarsa, swadaya, swadana) mengambil keputusan untuk memilih alternatif-alternatif “terbaik yang dapat dilaksanakan” demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggung jawab serta dibangkitkan semangatnya, agar turut serta dalam proses pembangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat membuat partisipasinya terhadap pembangunan dalam suatu komunitas tertentu masih sangat belum memadai. Dalam keadaan miskin, masyarakat sulit mengambil keputusan mana yang harus dilakukan antara kepentingan perut atau kepentingan bersama (gotong royong) yang mungkin boleh jadi akan membawa manfaat yang lebih besar. Untuk terjadinya proses pembaharuan yang continue berkesinambungan, maka perlu ada dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam segala aspek dan segi pembangunan. Kerjasama yang diharapkan pemerintah dari masyarakat adalah keikutsertaan atau turut sertanya segenap anggota masyarakat dalam menyumbangkan kemampuannya berupa pemikiran, keterampilan, bahan/material dan terlebih lagi adalah dana.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan juga juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut

Yuwono Teguh (2001:168) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam Negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan.
- d. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- e. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

2.3. Konsep Partisipasi Masyarakat

2.3.1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation”, take a part, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan

orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut.

Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Menurut Verhangen dalam Theresia (2015:197), sebagai suatu kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- 1) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
- 2) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
- 3) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.

- 4) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Tentang hal ini, Raharjo mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan, di atasi.
- b. Partisipasi penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- c. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

Sejalan dengan pemikiran diatas Hobley dalam Theresia dkk (2015:205) mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :

1. Partisipasi pasif

Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.

2. Partisipasi informative

Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi

3. Partisipasi

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi

4. Konsultatif

Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama

5. Partisipasi fungsional

Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek

6. Partisipasi interaktif

Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan

7. *Zelf mobilization* (Mandiri)

Masyarakat memegang kendali pemanfaatan sumber daya yang ada.

Menurut Sondang P Siagian (1985:2) terdapat dua jenis partisipasi dalam pembangunan yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi pasif dapat berupa perilaku masyarakat yang tidak ikut berperan aktif dalam setiap pembangunan yang ada dimasyarakat. Sedangkan Partisipasi aktif dapat berupa terlaksananya pembangunan sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan. Partisipasi aktif dapat terwujud apabila:

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga–lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasi.

2. Mewujudkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib sendiri kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal.
3. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.
4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kerelaan merupakan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan lebih penting.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.

Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).

Dusseldrop, dalam Theresia (2015:200), mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

2.3.3. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox dalam **Theresia (2015:202)** mengemukakan adanya lima tingkatan, yaitu:

1. Memberikan informasi
2. Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

4. Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Menurut Sastropetro (1988:128) Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya penataan ruang diantaranya karena beberapa hal positif yang dikandungnya :

- a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai.
- b. Dengan partisipasi pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya yang rendah.
- c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
- d. Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- e. Mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menurut UU No 25 tahun 2004 ialah masyarakat bersama pemerintah merupakan stakeholder dalam proses pembangunan. Artinya masyarakat merupakan elemen penting yang sangat menunjang keberhasilan dari pembangunan tadi, masyarakat diberikan peran yang cukup sentral. Di dalam pembangunan agar kiranya masyarakat tadi dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan ataupun proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan.

Slamet (1984:15) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan Membangun dengan semangat lokalitas.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang

dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Menurut Ndraha, (1987:27) upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki.
- b. Menyesuaikan program Pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
- c. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.

Dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat, komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara hubungan secara timbal balik, di satu pihak pemerintah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak masyarakat menyampaikan gagasan, keinginan atau kebutuhannya kepada pemerintah.

Selain itu pula Ndraha (1983: 125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi yakni :

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan syarat serta menerima

sepenuhnya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan Operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai atau evaluasi pembangunan.

Dan uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang bisa disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

2.4. Konsep Infrastruktur

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Dalam kehidupan manusia akan melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dapat melakukan aktivitasnya tersebut, masyarakat membutuhkan suatu pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang dapat

mendukung mereka dalam beraktivitas. Berbagai pelayanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas ini disebut juga dengan infrastruktur.

Peran infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg dalam Kodoatie R (2003:60) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan system ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Dari definisi tersebut Grigg Kodoatie R (2003:61) membagi infrastruktur dalam 13 kategori yang meliputi :

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (*treatment plant*).

- b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengelolaan, pembuangan dan daur ulang.
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi.
- f. Fasilitas transportasi : jalan rel, bandar udara, termasuk didalamnya adalah tanda dan fasilitas pengontrol.
- g. Sistem transit publik.
- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
- i. Fasilitas gas alam
- j. Gedung publik : Kantor, sekolah, rumah sakit
- k. Fasilitas perumahan public
- l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
- m. Komunikasi.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan yang tidak saja bermanfaat untuk

suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Dalam hal perbaikan pembangunan infrastruktur, pemerintah Desa Taluduyunu melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan. Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya.

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1980, Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Klasifikasi jalan dibagi menurut fungsi, kelas jalan, medan jalan dan wewenang pembinaaan jalan.

Adapun klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu:

1. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
2. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan lokal yaitu Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini di harapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah di lakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama adalah penelitian Wahyudin Nim 10700113089 dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng yaitu dilihat keempat bidang partisipasi yaitu perencanaan mencapai skor 58.6 persen atau berada pada kategori sedang, pelaksanaan mencapai skor 75.3 persen atau berada pada kategori tinggi, evaluasi/monitoring 77.4 persen berada pada kategori tinggi, dan pemanfaatan hasil 81.8 persen berada pada kategori sangat tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong pada kategori tinggi yang dibuktikan oleh skor gabungan bidangbidang partisipasi rata-rata 77.3 persen, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong tinggi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng adalah: faktor interen yang meliputi (kesadaran/kemauan, pendidikan, pendapatan/penghasilan). Faktor eksternal yang meliputi (pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia).

Penelitian yang kedua adalah penelitian Martiana Dwi Rahayu Nim 1416041051 dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini antara lain Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini yakni kegiatan sosialisasi. Pemerintah Desa Sinarsari berkomunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan di kantor Kelurahan Desa Sinarsari. Hal itu dilaksanakan untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan sosialisasi dilakukan tentunya dengan harapan agar lama-kelamaan masyarakat bisa menumbuhkan sendiri sifat partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan, Kepemimpinan. Keberhasilan program pembangunan infrastruktur di Desa Sinarsari banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal yakni Kepala Desa. Sifat Kepala Desa yang dinilai ramah, jujur, baik dan berwibawa membuat ia disegani

dan mudah diterima oleh masyarakat. Kesempatan. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan menjadi salah satu faktor pendorong partisipasi masyarakat. Kesempatan lain yang diberikan yakni untuk memilih pembangunan yang ingin dilaksanakan di daerahnya dan masyarakat berkesempatan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dari kedua penelitian diatas, dapat di Tarik kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada objek kajiannya serta teknik analisis data. Kedua penelitian terdahulu tersebut menggunakan teknik analisis data tabel frekuensi dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Sedangkan kesamaan penelitian yang telah di lakukan oleh Wahyudin dan Martiana Dwi Rahayu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2.6. Kerangka Pikir

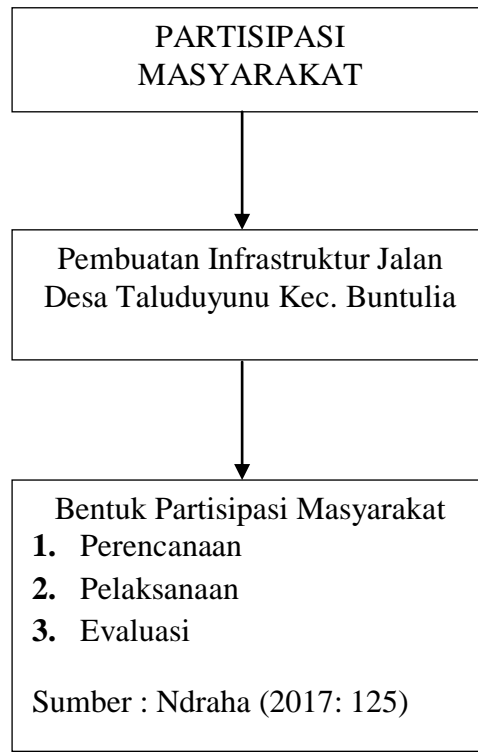
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Pembangunan di Desa salah satunya di pengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. infrastruktur memegang peranan

penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif.

Dalam realitasnya, tantangan infrastruktur jalan di pengaruhi oleh berbagai faktor, yang sifatnya pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya sumbangan dan dukungan masyarakat, serta adanya kemauan masyarakat dalam pembuatan jalan baru tersebut, karena pembangunan infrastruktur yang baik apabila masyarakat turut berpartisipasi didalamnya. Sedangkan faktor penghambat nya yaitu adanya dana

Desa membuat masyarakat cenderung kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan. Selain itu faktor penghambat lainnya karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Gambaran singkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui bagan berikut:



Gambar : 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur. Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, dan penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Desan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut Nawawi (2005: 64) bahwa bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat actual pada saat penelitian dilakukan dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana diikuti dengan interupsi yang akurat. Dengan metode deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas fakta-fakta yang ada dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian dan mencoba menganalisis untuk member kebenaran berdasarkan daya yang ada.

3.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan peneliti, maka dikemukakan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan jalan baru mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Indikator partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan infrastruktur antara lain :
 - a. Tahap perencanaan dimana masyarakat ikut dilibatkan untuk berfikir dalam musrenbang tentang. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan dalam hal ini adalah apakah masyarakat diibatkan dalam proses penyusunan program-program pembangunan.
 - b. Tahap pelaksanaan dimana masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi pada saat pelaksanaan pembangunan, dimana ada Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat.
 - c. Tahap evaluasi dimana dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat terhadap program yang sedang berjalan.
2. Pembangunan infrastruktur yang di maksud adalah pembangunan jalan baru. Pembangunan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya. Oleh karena itu, peran serta dari seluruh aparat Pemerintah Desa sangat di butuhkan untuk ikut andil dalam pembangunan desa.

3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitan kualitatif, informan penelitian tidak berdasarkan populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan

secara sengaja dan akan memberikan berbagai informasi-informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam yaitu: Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan informan sebagai sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2005: 53).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Taluduyunu	1 orang
2. Ketua BPD Taluduyunu	1 orang
3. Tokoh masyarakat	1 orang
4. Masyarakat	4 orang
Total Informan	7 orang

3.5. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan dan melalui pembagian kuesioner.
2. Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa data penting lainnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan peran pemerintah di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif. Menurut Farid (1997:152) bahwa analisa kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data dan informasi. Teknik analisa data kualitatif

menggunakan model interaktif, dengan menyajikan hasil wawancara, observasi dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Taluduyunu

1. Letak geografis

Desa taluduyunu adalah sebuah desa yang terletak disebelah utara kecamatan marisa yang berdiri sejak tahun 1700 yang silam, daghulu desa taluduyunu adalah dataran rendah yang hanya ditumbuhi oleh semak-semak yang berduri, yang merupakan tempat mencari makanan binatang-binatang buas seperti babi hutan, rusa dan anoah.

2. Asal mula penduduk desa taluduyunu dari aspek historis adalah:

Pada tahun 1774 datang sekelompok manusia berasal dari hulondthalangi atau dikenal sekarang gorontalo karena diakibatkan oleh perang panipi dan hulondthalangi. Rombongan ini berjumlah 160 orang. Kemudian maksud kedatangan mereka ini adalah untuk mencari nafka/penghidupan yang layak dan aman dari serangan musuh.

Kemudian pada tahun 1889 rombongan ini sempat singgah di paguyaman untuk istirahat dan setelah itu mereka meneruskan perjalanan menuju kearah barat gorontalo dengan berjalan kaki, maka sampailah mereka pada tahun 1990. Rombongan yang berjumlah 80 orang di pimpin oleh Taluhulawa dan kemudian di bagi menjadi dua bagian jumlahnya menjadi 40 orang untuk membuka kebun dan 40 orang mencari emas.

Kemudian yang satu kelompok lagi berjumlah 80 orang yang di pimpin oleh Alam Bau juga dibagi menjadi dua bagian jumlahnya 40 orang mencari emas dan 40 orang untuk membuka kebun. Setelah beberapa tahun lamanya mereka tinggal di hutan salah seorang mereka memberikan saran untuk membuka suatu perkampungan untuk memenuhi kehidupan yang layak, sesuai dan terorganisir dengan baik. Untuk menunjang sebuah perkampungan maka dipilih secara musyawarah mufakat dan terpilihlah SUPU SALEH sebagai pemimpin kampong dari Tahun 1893 s/d 1900

Lahirnya nama Taluduyunu di sesuaikan dengan kampung yang mana ditempat itu sebatang pohon kayu yang mereka beri nama DUYUNU yang hidup dipinggir sungai yang apabila bunga kayu itu jatuh di air maka akan berubah warna air tersebut yang mana airnya akan berwarna kemerah-merahan.

Sehingga dengan hasil musyawarah mereka saat itu sepakat memberikan nama kampong tersebut dengan nama Taluduyunu TALU berarti AIR dan DUYUNU berarti BUNGA POHON itu. Sampai saat ini secara Geografis Desa Taluduyunu adalah persawahan dan perladangan (kebun) dengan luas 6400 Ha,yang terdiri dari empat dusun yakni ; Dusun Kabibile, Dusun Wawohu, Dusun Motoduto, dan Dusun Hutino.

Dengan letak Geografisnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Taluduyunu Utara

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Teratai dan Desa Botubilotahu

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Buntulia Utara

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Balayo.

Nama-Nama Kepala Desa Taluduyunu

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1839-1900	SUPU SALEH	61 TAHUN MENJABAT
2	1900-1918	SAMAUN GIASI	18 TAHUN MENJABAT
3	1918-1926	K.C HARAS	8 TAHUN MENJABAT
4	1926-1947	ILOHE NIHE	21 TAHUN MENJABAT
5	1947-1948	IBRAHIM AMBO	1 TAHUN MENJABAT
6	1948-1964	N.P SUPU	16 TAHUN MENJABAT
7	1964-1973	BAGOI BANGGA	9 TAHUN MENJABAT
8	1973 (6 BULAN)	SAMIUN TANTU	6 TAHUN MENJABAT
9	1973-1977	ALDIN ALI	4 TAHUN MENJABAT
10	1977-1980	NGGILU R. TANE	3 TAHUN MENJABAT
11	1980-1984	ALIS S. TANTU	4 TAHUN MENJABAT
12	1984-1987	YUNUS ABDULLAH	3 TAHUN MENJABAT
13	1987-1998	TAHIR PAKAYA	11 TAHUN MENJABAT
14	1998-2006	HUSIN POTUTU	8 TAHUN MENJABAT
15	2006-2012	RASYID PONGOLIU, SE	6 TAHUN MENJABAT
16	2012-2018	SUKIMAN M. BAGU	6 TAHUN MENJABAT
17	2018- SEKARANG	ABDUL HAMID SUKOLI	6 TAHUN MENJABAT

4.1.2 Tugas pokok

Tugas dan Fungsi kepala seksi pemerintah

1. Kepala seksi pemerintah bertugas membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- A. Melaksanakan manajemen tatapraja pemerintah;
- B. Menyusun rencana regulasi desa dan pembinaan masalah pertanahan;
- C. Melaksanakan pembinaan ketebtraman dan ketertiban serta upaya perlindungan masyarakat;
- D. Melaksanakan administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan profil desa;
- E. Melaksanakan pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- F. Pelaksanaan kegiatan social politik dan organisasi kemasyarakatan;
- G. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas dan fungsi kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan

1. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan bertugas membantu kepala desa dalam bidang pembangunan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi:

- A. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan pada berbagai bidang;
- B. Melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat pada bidang keagamaan, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup;

- C. Melaksanakan pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, wisata dan karang taruna;
- D. Melaksanakan identifikasi potensi ekonomi, investasi, dan pengembangan usaha masyarakat desa;
- E. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas dan fungsi kepala dusun

1. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kerjanya.
2. Dalam melaksanakan tugas kepala dusun sebagaimana dimaksud pada point (1) mempunyai fungsi:
 - A. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilisasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah;
 - B. Membantu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah kerjanya;
 - C. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - D. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah kerjanya;

E. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Hasil penelitian

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan merupakan hal yang sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakat jugalah tahu permasalahan yang mereka hadapi. Namun, kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap program pembangunan, partisipasi masyarakat belum terlihat secara keseluruhan, termasuk partisipasi dalam pembangunan jalan. Keadaan masyarakat yang kurang melibatkan dirinya dalam program pembangunan dilihat dari belum adanya sistem yang memberikan ruang yang aman memadai atau belum tersedianya suatu kerangka kerja bagi proses partisipasi masyarakat. Dan disamping itu masih rendahnya kemampuan untuk mengembangkan partisipasi akibat tidak terbiasanya masyarakat melibatkan diri dalam pembangunan jalan.

Walaupun peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan menentukan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, oleh karena untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang. Berbagai macam kendala dan hambatan yang

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat saja berasal dari masyarakat itu sendiri, dari lembaga atau organisasi, atau bahkan dari pemerintah kecamatan itu sendiri.

4.2.1 Pembuatan Infrastruktur Jalan Desa Taluduyunu Kec. Buntulia

Transportasi berupa jalan, sangat penting untuk menunjang kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Tidak terkecuali masyarakat Desa Taluduyunu yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan penambang, tentunya sangat membutuhkan akses jalan untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil tambang warga masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur struktur jalan desa merupakan salah satu alternatif penting dalam membangun wilayah pedesaan. Jalan desa yang baik dan terawat merupakan kunci untuk meningkatkan aktivitas antar desa, menghubungkan desa dengan pusat perekonomian, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di desa yang bersangkutan., karena akan memperlancar distribusi barang dari desa ke pasar, meningkatkan akses pasar bagi produk-produk desa, serta mendorong berkembangnya sektor pariwisata di desa. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Taluduyunu merupakan upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan jaringan jalan di wilayah Desa Taluduyunu. Jaringan jalan desa mencakup jalan antar desa, jalan menuju desa dari jalan utama, serta jalan-jalan di dalam desa itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur jalan desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas penduduk di Desa Taluduyunu dalam aktivitas mereka sehari-hari, termasuk dalam memasarkan hasil produksi pertanian dan tambang masyarakat desa..

Apabila jalan di Desa Taluduyunu sudah baik dan dirawat dengan baik, maka jalan tersebut sangat penting untuk menghubungkan desa-desa dengan akses utama seperti kota atau pusat perekonomian lainnya. Hal ini akan memudahkan penduduk Desa Taluduyunu dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan tempat kerja di luar desa. Selain itu, jalan desa yang baik juga akan memperlancar distribusi barang dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk desa.

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur jalan desa

Kegiatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat lokal, implementasi program pembangunan dan pengawasannya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa yang diarahkan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat pedesaan setempat berarti orientasi pembangunan adalah ke dalam, karena anggota masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui potensi dan kondisi masyarakatnya.

Olehnya itu, perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program

yang berasal dari alokasi dana desa tersebut. Kegiatan perencanaan dilakukan di Kantor Desa Taluduyunu dengan menghadirkan para tokoh masyarakat yang mewakili dusun masing-masing, kepala-kepala dusun, dan warga masyarakat. musyawarah ini meliputi kegiatan sosialisasi tentang pembangunan infrastruktur jalan desa, yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes). Dalam musrengbangdes akan dibahas jumlah dana alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, serta dilanjutkan dengan program pembangunan yang dibangun di Desa Taluduyunu. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa diharapkan dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan bapak Dirman Rabiasa (Kepala Desa Taluduyunu) tentang warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu, kepala desa mengatakan:

“Iya, tentunya warga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan infranstruktur jalan untuk membantu mensejahterakan Masyarakat Desa Taluduyunu, terutama untuk mengangkut atau angkutan hasil panen masyarakat. Warga masyarakat sudah dilibatkan pada saat sosialisasi penggunaan alokasi dana desa yang berlangsung di Kantor Desa Taluduyunu, seperti kehadiran masyarakat, pertanyaan dan saran yang diberikan masyarakat. Kemudian partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pada saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes), disitu masyarakat menanyakan berapa besar penggunaan anggaran alokasi dana desa untuk sektor infrastruktur jalan desa dan program pembangunan desa lainnya” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Suhasman Pakaya (Ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“Tentu saja warga dilibatkan, peran masyarakat berupa kehadiran dan ide. Namun, kecenderungan yang terjadi bahwa warga masyarakat yang mengemukakan ide dan pendapat, saran atau bahkan kritikan, biasanya hanya itu saja orangnya atau orang yang sama, sehingga terkesan monoton dan ada dominasi dari warga tertentu. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk kepala desa untuk menghimbau warga untuk mau memberikan saran, ide, pendapat atau kritikan, agar dalam pelaksanaan proyek jalan desa nantinya hanya sedikit hambatan” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024).

Dari pendapat kedua informan tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur jalan desa sangat penting karena permasalahan muncul dari mereka, karena kesulitan akses jalan. Dalam tahap ini, masyarakat turut serta dalam memberikan masukan tentang apa saja yang mereka butuhkan untuk segera diadakan di dusun mereka masing-masing, sehingga nantinya hasil keputusan musyawarah melibatkan masyarakat sebagai salah satu pengambil keputusan atas lahirnya sebuah rencana. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsure masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif perencanaan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian, hasil wawancara dengan Abd Rahman Karim (Tokoh Masyarakat), mengenai warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu, mengatakan bahwa:

“Iya, adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini, yaitu hadir rapat dan sumbangan pemikiran. Namun masih banyak warga masyarakat yang kurang berpartisipasi karena menurut mereka sudah diwakilkan kepada perwakilannya yaitu tokoh masyarakat di dusun mereka masing-masing. Hal ini yang masih harus ditingkatkan menurut saya, karena bagaimanapun juga, warga masyarakatlah yang membutuhkan dan akan merasakan hasil pembangunan yang telah selesai dibangun. Di samping itu, tidak semua kebutuhan warga dapat diketahui oleh tokoh masyarakat kalau warga yang bersangkutan tidak menyampaikan aspirasi mereka kepada tokoh masyarakat” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Musa Tantu (warga masyarakat), mengatakan bahwa:

“Saya sering dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di Desa Taluduyunu, mulai pada saat sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, saya memberikan masukan bahwa yang penting dalam kegiatan ini ialah warga masyarakat merelakan tanahnya untuk dijadikan jalan desa dan mereka mendapat kompensasi yang sesuai dengan luas tanah yang diambil sebagai jalan desa. Olehnya itu, saya masyarakat yang selalu mendukung pembangunan yang dilakukan” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sumarno Husain (warga masyarakat) mengatakan bahwa:

“Saya kadang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di Desa Taluduyunu. Kalau dalam kegiatan perencanaan infrastruktur jalan desa, saya hadir pada saat sosialisasi, tapi tidak hadir pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa karena sudah diwakili tokoh masyarakat kami. Namun pada dasarnya, saya sebagai warga masyarakat Desa Taluduyunu selalu mendukung penuh untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Taluduyunu” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024).

Berdasarkan pendapat informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, mulai dari kegiatan sosialisasi program dan sumber dananya, kemudian dibawa ke kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes), dimana partisipasi warga masyarakat dalam bentuk kehadiran baik langsung atau perwakilan tokoh masyarakat, memberikan masukan berupa saran dan kritikan terkait keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa, terutama pada proses ganti rugi tanah warga yang terpakai untuk pembuatan jalan desa.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa

Tahapan selanjutnya dalam pembangunan infrastruktur jalan desa yakni pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam tahapan ini, bentuk partisipasi masyarakat yang sangat diharapkan yakni tenaga dalam bentuk gotong royong menyelesaikan pembangunan jalan desa. Partisipasi ini merupakan tindakan selanjutnya dari tahap pertama, partisipasi dalam pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikutserta dalam memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Berhasilnya suatu pembangunan tergantung dari keikutsertaan dalam berpartisipasi penuh.

Selama ini pelaksanaan pembangunan hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Idealnya pemerintah bersikap responsive terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan mau mendengarkan kemauan mereka. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sangat tergantung pada peran pemerintah dan masyarakat. Kerja sama antara keduanya harus tercipta, sebab tanpa masyarakat pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Strategi pembangunan juga harus tepat, agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Hasil wawancara dengan bapak Dirman Rabiasa (Kepala Desa Taluduyunu) tentang partisipasi apa saja yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu, kepala desa mengatakan:

“Masyarakat bersama-sama menjaga pelaksanaan pembangunan jalan desa, pemberian bantuan tenaga ketika pembangunan jalan desa sedang dilaksanakan. Partisipasi tenaga warga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan jalan desa. Partisipasi lain diharapkan yakni partisipasi keterampilan, dimana warga masyarakat memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan jalan desa” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024).

Kemudian hasil wawancara dengan Suhasman Pakaya (Ketua BPD) mengatakan bahwa:

“Adapun partisipasi lain dari masyarakat berupa partisipasi tenaga dan keterampilan, serta saling menjaga pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu. Tidak menutup kemungkinan, warga masyarakat juga dapat ikutserta memberikan bantuan dana untuk membantu penyelesaian jalan desa” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024).

Informasi yang agak berbeda disampaikan oleh Abd Rahman Karim (Tokoh Masyarakat), yang mengatakan bahwa:

“Ya, tentunya kalau dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. maka warga membantu dengan bekerja gotong royong mengerjakan jalan desa, dan adapun partisipasi lain dari masyarakat yaitu tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Penolakan terjadi karena masyarakat kurang puas dengan ganti rugi tanah yang diambil untuk dijadikan jalan desa, sehingga menurut saya, partisipasi masyarakat terjadi kalau mereka setuju dengan pembangunan jalan desa, mulai dari pergantian ganti rugi sampai pada pelaksanaan pembangunan jalan. Tetapi kalau warga kurang puas dengan ganti rugi tanah mereka, maka jangan harap ada partisipasi dari mereka” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024).

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah pedesaan menghadapi hambatan dan kendala yang tidak ringan dilihat dari aspek geografis, topografis, demografis, ketersediaan sarana dan prasarana, kelemahan dalam akses terhadap modal dan informasi pasar, kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang lemah, partisipasi masyarakat masih belum secara proaktif, kemampuan kelembagaan pedesaan masih lemah, dan masih banyak kelemahan operasional dan fungsional lainnya.

Kemudian, hasil wawancara dengan Husin Potutu (warga masyarakat) mengatakan bahwa:

“Saya selalu biasa ikut membantu dalam proses pembangunan infrastruktur Desa Taluduyunu, berupa tenaga dan biaya pembangunan seadanya. Tapi, saya juga pernah tidak ikut berpartisipasi karena kurang setuju dengan cara pemerintah desa dalam menyelesaikan pembayaran kompensasi tanah warga yang dijadikan jalan

desa. Waktu itu, salah satu saudara kami, tanahnya dijadikan jalan desa, tetapi sampai pelaksanaan pembangunan jalan desa, pembayaran ganti rugi tanah, belum selesai. Jadi sebenarnya warga masyarakat mendukung pembangunan jalan desa karena keberadaan jalan desa tersebut akan dinikmati oleh warga desa sendiri, tapi kalau tanah mereka tidak atau kurang diberi kompensasi yang pantas, tentu mereka tidak peduli dengan kegiatan pembangunan jalan desa tersebut” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sumarno Husain (warga masyarakat) mengatakan bahwa:

“Sejauh ini partisipasi saya dalam pelaksanaan pembangunan di desa Taluduyunu, ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk memberikan ide-ide terkait dengan pembangunan yang ada. Sejauh ini partisipasi masyarakat terkait untuk perencanaan pembangunan yang ada di desa, ikut serta mendukung penuh proses pembangunan yang ada di Desa Taluduyunu” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Ilyas Yusuf (warga masyarakat) mengatakan bahwa:

“Saya membantu menentukan arah dan orientasi pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan desa. Bentuk keikutsertaan kami selaku warga masyarakat yakni bergotong royong, membantu anggaran bagi warga yang mampu dan solusi yang diberikan untuk pembangunan jalan yang diinginkan. Tapi untuk pembangunan jalan desa baru-baru ini, saya kurang berpartisipasi karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, dimana bentuk partisipasi warga yang paling dominan, yakni tenaga dalam menyelesaikan pembangunan jalan desa. Bentuk partisipasi lain yakni anggaran bagi warga yang mampu dan solusi yang diberikan untuk pembangunan jalan yang diinginkan. Namun terdapat juga informan yang mengatakan bahwa warga

kurang berpartisipasi karena proses penyelesaian kompensasi tanah warga sebagai ganti rugi pemanfaatan tanah warga menjadi jalan desa, mengalami keterlambatan.

3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa

Suatu kegiatan dapat dinilai apabila memberi manfaat yang sepantasnya bagi masyarakat. Maka dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan masyarakat menjadi hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada. Suatu program pembangunan yang telah dilaksanakan, harus dilihat apakah dapat memberikan manfaat pada masyarakat banyak atau hanya untuk sebagian masyarakat saja.

Tujuan pembangunan infrastruktur jalan desa yakni mewujudkan harapan masyarakat dalam aspek transportasi, dimana masyarakat desa dapat memanfaatkan jalan tersebut untuk mengangkut hasil pertanian atau pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Kalau dilihat dari aspek partisipasi masyarakat, maka dalam tahap ini masyarakat secara bersama akan menikmati hasil pembangunan infrastruktur jalan desa dengan adil tanpa ada pengecualian. Setiap masyarakat akan mendapatkan bagian sebesar kontribusi atau pengorbanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dirman Rabiasa (Kepala Desa Taluduyunu) tentang warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu, kepala desa mengatakan:

“Peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Semua proses kegiatan inilah yang dievaluasi, baik oleh pemerintah desa maupun warga masyarakat. Karena pembangunan infrastruktur jalan desa pada dasarnya ditujukan untuk melancarkan transportasi masyarakat desa dalam memasarkan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan lainnya, maka tentunya evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dalam memanfaatkan jalan desa tersebut” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Suhasman Pakaya (Ketua BPD) mengatakan bahwa:

“Dengan dilibatkannya warga Taluduyunu untuk melaksanakan pembangunan, maka akan membantu warga untuk mendapatkan penghasilan. Warga masyarakat juga sering memberikan penilaian pada jalan desa yang telah dibangun karena dapat memperlancar kegiatan mereka sehari-hari dan juga dapat memasarkan hasil pertanian mereka” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Abd Rahman Karim (Tokoh Masyarakat), mengatakan bahwa:

“Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, rencana yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mengenai keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa, menurut saya tanpa diminta, masyarakat melakukannya sendiri dengan memberikan tanggapan terhadap manfaat atau bahkan kualitas jalan desa yang telah digunakan oleh warga masyarakat. Pada umumnya, warga masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap keberadaan jalan desa” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024).

Manfaat yang dapat diterima dalam pembangunan infrastruktur jalan desa ini, yaitu manfaat materialnya, manfaat sosialnya, dan manfaat pribadi. Banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis dari hasil-hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat

dibedakan antara *material benefit* dan *sosial benefits*. *Material benefits* dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan *sosial benefits* seperti, pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan, fasilitas transportasi.

Hasil wawancara dengan Musa Tantu (warga masyarakat), tentang masyarakat di Desa Taluduyunu dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan dan peran dalam proses evaluasi pembangunan, mengatakan bahwa:

“Iya, masyarakat dilibatkan untuk menilai manfaat dan kualitas jalan desa yang telah jadi. Menurut saya jalan apapun yang dibangun, tentu dapat memberikan manfaat bagi kami selaku warga yang menggunakannya, tapi apakah jalan desa tersebut dapat bertahan lama atau tidak, itu yang menjadi pertanyaannya. Dan pada kenyataannya ada jalan desa yang baru satu tahun, sudah pecah atau rusak dan digenangi air kalau hujan” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ilyas Yusuf (warga masyarakat) mengatakan bahwa:

“Iya, masyarakat dilibatkan dengan cara memberikan tanggapan mengenai keberadaan jalan desa, apakah baik untuk digunakan dan bagaimana dengan kualitas jalan desa, apakah bisa digunakan dalam jangka panjang atau cepat rusak. Yang jelas bahwa semua jalan desa yang dibangun dapat memberikan manfaat kepada saya karena dapat mempermudah pengangkutan hasil pertanian, hanya saja kualitas jalan desa yang harus lebih diperhatikan lagi karena ada jalan desa yang cepat rusak” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan, yakni dengan memberikan tanggapan tentang keberadaan jalan desa yang dapat memberikan manfaat atau tidak dan kualitas jalan

desa. Jalan desa yang dibangun dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama dapat mempermudah aktivitas warga ke persawahan dan juga untuk pengangkutan hasil pertanian warga, namun masih ada jalan desa yang kualitasnya kurang baik sehingga jalan desa yang telah bangun cepat rusak dan harus diperbaiki kembali.

4.3 Pembahasan hasil penelitian

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan kebutuhan dasar, seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (akses jalan). Partisipasi masyarakat merupakan hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Olehnya itu, agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Disisi lain, infrastruktur jalan yang dibangun juga merupakan kebutuhan yang mendesak bagi

masyarakat desa itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa, maka kegiatan pembangunan sebaiknya diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah desa, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Adisasmita, (2019:38) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Hasil penelitian Kogoya, dkk (2015) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemeliharaan. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, terdiri dari partisipasi dalam bentuk memberikan saran/usulan, kritik dan tidak memberikan partisipasi. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana, dan material. Partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan terdiri atas tenaga, uang dan tidak memberikan partisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur jalan desa, masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa dalam bentuk kehadiran baik langsung atau perwakilan tokoh masyarakat, memberikan masukan berupa saran dan kritikan terkait keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa. Hasil

penelitian Hardianti, dkk (2017:122) menunjukkan bahwa perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa. Dalam hal ini perencanaan kegiatannya meliputi musyawarah yang dilakukan di kantor desa. Maka setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah Musyawarah pembangunan tingkat desa (Musbangdes).

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang utama dalam setiap aktivitas-aktivitas administrasi atau manajemen. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif. Di dalam perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas administrasi atau manajemen, sebab dalam perencanaan dirumuskan dan ditetapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai: apa yang harus dilakukan, mengapa harus dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana hal tersebut akan dikerjakan. Menurut Nawawi (2018:30) bahwa perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya.

Komitmen semua pihak, baik pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat merupakan kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan pembangunan infrastuktur jalan desa. Dalam perencanaan pembangunan infrastuktur jalan desa, perencanaan partisipatif diwujudkan antara

lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan (masyarakat, organisasi non pemerintah, dan lain-lain). Dapat dikatakan bahwa perencanaan yang baik senantiasa memperhitungkan keadaan saat ini, keberhasilan dan kegagalan di waktu lampau, potensi yang ada, kemampuan merealisasikan potensi yang ada dan kendala yang dihadapi. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan infrastruktur jalan desa, masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target. Slamet dalam Turindra (2019:1) mengatakan salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rosmita (2019) yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dikategorikan tinggi, artinya masyarakat Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sangat Berpartisipasi dilihat dari kepedulian dalam kemajuan

pembangunan infrastruktur seperti: gotong royong, ikut serta dalam pembangunan gedung-gedung desa, dan dalam perencanaan desa.

Kemudian hasil penelitian dari aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa menunjukkan bahwa warga masyarakat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, dimana bentuk partisipasi warga yang paling dominan, yakni tenaga dalam menyelesaikan pembangunan jalan desa. Bentuk partisipasi lain yakni anggaran bagi warga yang mampu dan solusi yang diberikan untuk pembangunan jalan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat akan timbul kalau program pembangunan infrastruktur jalan desa disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibran S (2018) yang menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan dalam pembangunan di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan secara umum cukup baik, dimana setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Lerepako selalu diberitahukan dan disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, selain itu pembangunan-pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Lerepako juga sangat melibatkan masyarakatnya. Mardikanto dalam Turindra (2019:1) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Warga masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Taluduyunu. Proses perencanaan mulai dari kegiatan sosialisasi program dan sumber dananya, kemudian dibawa ke kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes), dimana partisipasi warga masyarakat dalam bentuk kehadiran baik langsung atau perwakilan tokoh masyarakat, memberikan masukan berupa saran dan kritikan terkait keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, dimana bentuk partisipasi warga yang paling dominan, yakni tenaga dalam menyelesaikan pembangunan jalan desa. Bentuk partisipasi lain yakni anggaran bagi warga yang mampu dan solusi yang diberikan untuk pembangunan jalan yang diinginkan. Namun terdapat juga informan yang mengatakan bahwa warga kurang berpartisipasi karena proses penyelesaian kompensasi tanah warga sebagai ganti rugi pemanfaatan tanah warga menjadi jalan desa, mengalami keterlambatan. Di samping itu, masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan, yakni dengan memberikan tanggapan tentang keberadaan jalan desa yang dapat memberikan manfaat atau tidak dan kualitas jalan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran, yakni:

1. Dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, sebaiknya pemerintah desa dan lembaga yang ada di desa, lebih fokus mensosialisasikan program pada tingkat dusun, karena lokasi pembangunan jalan desa ialah di dusun sehingga warga sekitar dapat mengetahui akan ada kegiatan pembangunan di dusunnya. Hal ini penting, agar jika ada warga yang menolak, dapat segera diselesaikan secepat mungkin, agar pembangunan jalan desa mendapat dukungan sebagian besar warga masyarakat sekitar lokasi proyek jalan desa.
2. Pemerintah desa sebaiknya menyelesaikan dengan baik proses ganti rugi warga yang tanahnya masuk dalam pembangunan jalan desa, agar tidak mendapat penolakan dari warga sekitar. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilibatkan tokoh masyarakat setempat, agar mudah dicarikan jalan keluarnya. Kalau ada warga yang merasa tidak mendapat ganti rugi yang layak, maka dalam pelaksanaannya nantinya akan mendapat penolakan dari sebagian warga masyarakat.
3. Disarankan kepada pemerintah Desa Taluduyunu untuk melaksanakan pekerjaan jalan desa pada hari-hari libur, agar warga masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Praja Soedjono, *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga Press, 2002)
- Adisasmita, Rahardjo. 2019. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung :Alfabeta.
- Hardianti, Sri, dkk. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota). e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari 2017 hlm 120-126.
- Ibid Sadu Wasistio. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. GRAHA ILMU, Yogyakarta.
- Ibran S. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan). Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi Volume 3 No.2 April 2018.
- Kodoatie, R. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kogoya, Teraik. 2015. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 no. 2 – Juni 2015.

- Nawawi, Hadari. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nawawi, Hadari H. 2018. Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2017. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di beberapa desa. Jakarta : yayasan karya dharma
- Poerwadarminta. Kamus umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 2003.
- Radjab Mansyur, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Jurusan Sosiologi FISIP UH, 2014
- Rahman dan Rosmita. 2019. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Vol. 1 No. 2, Mei 2019: Hal 01-19
- Riyadi, dan Dedy Supriyady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan, tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Agromedia pustaka.
- Sastropetro santoso. Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam pembangunan nasional. (1988). Bandung : Alumni.
- Slamet, Margono. (1985) *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Cv. Rajawali: Jakarta hal 7
- Slamet margono. (1985) Pengantar sosiologi. Cv. rajawali: Jakarta

Soejono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. PT Grafindo Persada. Jakarta.

Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sondang P. Siagian. (1985), *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Turindra. 2019. *Pengembangan Masyarakat*. Kencana Prenada Media Group, Bengkulu

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 dalam pasal Pasal 1 ayat 41

Undang-Undang No.13 Tahun 1980 tentang jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa

PEDOMAN WAWANCARA (KEPALA DESA)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Dirman Rabiassa
2. Tanggal wawancara : 20 Maret 2024
3. Jenis Kelamin* : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir** : Diploma

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?

JAWABAN

1. Iya, tentunya warga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan infranstruktur jalan untuk membantu mensejahterakan Masyarakat Desa Taluduyu, terutama untuk mengangkut atau angkutan hasil panen masyarakat. Warga masyarakat sudah dilibatkan pada saat sosialisasi penggunaan alokasi dana desa yang berlangsung di Kantor Desa Taluduyunu, seperti kehadiran masyarakat, pertanyaan dan saran yang diberikan masyarakat. Kemudian partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pada saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes), disitu masyarakat menanyakan berapa besar penggunaan anggaran alokasi dana desa untuk sektor infrastruktur jalan desa dan program pembangunan desa lainnya.
2. Masyarakat bersama-sama menjaga pelaksanaan pembangunan jalan desa, pemberian bantuan tenaga ketika pembangunan jalan desa sedang dilaksanakan. Partisipasi tenaga warga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan jalan desa. Partisipasi lain diharapkan yakni partisipasi keterampilan, dimana warga masyarakat memberikan dorongan

melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan jalan desa.

3. Peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Semua proses kegiatan inilah yang dievaluasi, baik oleh pemerintah desa maupun warga masyarakat. Karena pembangunan infrastruktur jalan desa pada dasarnya ditujukan untuk melancarkan transportasi masyarakat desa dalam memasarkan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan lainnya, maka tentunya evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dalam memanfaatkan jalan desa tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA (KETUA BPD)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Suhasman Pakaya
2. Tanggal wawancara : 20 Maret 2024
3. Jenis Kelamin* : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir** : Diploma

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?

JAWABAN

1. Tentu saja warga dilibatkan, peran masyarakat berupa kehadiran dan ide. Namun, kecenderungan yang terjadi bahwa warga masyarakat yang mengemukakan ide dan pendapat, saran atau bahkan kritikan, biasanya hanya itu saja orangnya atau orang yang sama, sehingga terkesan monoton dan ada dominasi dari warga tertentu. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk kepala desa untuk menghimbau warga untuk mau memberikan saran, ide, pendapat atau kritikan, agar dalam pelaksanaan proyek jalan desa nantinya hanya sedikit hambatan.
2. Adapun partisipasi lain dari masyarakat berupa partisipasi tenaga dan keterampilan, serta saling menjaga pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu. Tidak menutup kemungkinan, warga masyarakat juga dapat ikutserta memberikan bantuan dana untuk membantu penyelesaian jalan desa.
3. Dengan dilibatkannya warga Taluduyunu untuk melaksanakan pembangunan, maka akan membantu warga untuk mendapatkan penghasilan. Warga masyarakat juga sering memberikan penilaian pada jalan desa yang telah

dibangun karena dapat memperlancar kegiatan mereka sehari-hari dan juga dapat memasarkan hasil pertanian mereka.

PEDOMAN WAWANCARA (TOKOH MASYARAKAT)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Abd Rahman Karim
2. Tanggal wawancara : 21 Maret 2024
3. Jenis Kelamin : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir : SLTP

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah warga masyarakat dilibatkan dan bagaimanakah peran warga masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?

JAWABAN

1. Iya, adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini, yaitu hadir rapat dan sumbangan pemikiran. Namun masih banyak warga masyarakat yang kurang berpartisipasi karena menurut mereka sudah diwakilkan kepada perwakilannya yaitu tokoh masyarakat di dusun mereka masing-masing. Hal ini yang masih harus ditingkatkan menurut saya, karena bagaimanapun juga, warga masyarakatlah yang membutuhkan dan akan merasakan hasil pembangunan yang telah selesai dibangun. Di samping itu, tidak semua kebutuhan warga dapat diketahui oleh tokoh masyarakat kalau warga yang bersangkutan tidak menyampaikan aspirasi mereka kepada tokoh masyarakat.
2. Ya, tentunya kalau dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. maka warga membantu dengan bekerja gotong royong mengerjakan jalan desa, dan adapun partisipasi lain dari masyarakat yaitu tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Penolakan terjadi karena masyarakat kurang puas dengan ganti rugi tanah yang diambil untuk dijadikan jalan desa, sehingga menurut saya, partisipasi masyarakat terjadi kalau mereka setuju dengan pembangunan jalan desa, mulai dari pergantian ganti rugi

sampai pada pelaksanaan pembangunan jalan. Tetapi kalau warga kurang puas dengan ganti rugi tanah mereka, maka jangan harap ada partisipasi dari mereka.

3. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, rencana yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mengenai keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa, menurut saya tanpa diminta, masyarakat melakukannya sendiri dengan memberikan tanggapan terhadap manfaat atau bahkan kualitas jalan desa yang telah digunakan oleh warga masyarakat. Pada umumnya, warga masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap keberadaan jalan desa.

PEDOMAN WAWANCARA (WARGA MASYARAKAT)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Musa Tantu
2. Tanggal wawancara : 25 Maret 2024
3. Jenis Kelamin : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir : SLTP

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia? Bagaimanakah peran bapak dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Sejauh mana partisipasi bapak/ibu dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu? Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah masyarakat di Desa Taluduyunu dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan? Bagaimanakah peran bapak/ibu dalam dalam proses evaluasi pembangunan?

JAWABAN

1. Saya sering dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di Desa Taluduyunu, mulai pada saat sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam proses perencanaan pembangunan infratraktur jalan desa, saya memberikan masukan bahwa yang penting dalam kegiatan ini ialah warga masyarakat merelakan tanahnya untuk dijadikan jalan desa dan mereka mendapat kompensasi yang sesuai dengan luas tanah yang diambil sebagai jalan desa. Olehnya itu, saya masyarakat yang selalu mendukung pembangunan yang dilakukan.
2. Saya selalu ikut terjun dalam kegiatan pembangunan untuk mensejahterakan Desa Taluduyunu. Selalu membayar pajak tepat waktu, kompak dan rela bekerja sama tanpa memperhatikan perbedaan yang ada.

3. Iya, masyarakat dilibatkan untuk menilai manfaat dan kualitas jalan desa yang telah jadi. Menurut saya jalan apapun yang dibangun, tentu dapat memberikan manfaat bagi kami selaku warga yang menggunakannya, tapi apakah jalan desa tersebut dapat bertahan lama atau tidak, itu yang menjadi pertanyaannya. Dan pada kenyataannya ada jalan desa yang baru satu tahun, sudah pecah atau rusak dan digenangi air kalau hujan.

PEDOMAN WAWANCARA (WARGA MASYARAKAT)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Sumarno Husain
2. Tanggal wawancara : 25 Maret 2024
3. Jenis Kelamin : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir : SD

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia? Bagaimanakah peran bapak dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Sejauhmana partisipasi bapak/ibu dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu? Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah masyarakat di Desa Taluduyunu dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan? Bagaimanakah peran bapak/ibu dalam dalam proses evaluasi pembangunan?

JAWABAN

1. Saya kadang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di Desa Taluduyunu. Kalau dalam kegiatan perencanaan infratraktur jalan desa, saya hadir pada saat sosialisasi, tapi tidak hadir pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa karena sudah diwakili tokoh masyarakat kami. Namun pada dasarnya, saya sebagai warga masyarakat Desa Taluduyunu selalu mendukung penuh untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Taluduyunu.
2. Sejauh ini partisipasi saya dalam pelaksanaan pembangunan di desa Taluduyunu, ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk memberikan ide-ide terkait dengan pembangunan yang ada. Sejauh ini partisipasi masyarakat terkait untuk perencanaan pembangunan

yang ada di desa, ikut serta mendukung penuh proses pembangunan yang ada di Desa Taluduyunu.

3. Iya, masyarakat dilibatkan. Sangat bermanfaat untuk proses pembangunan.

PEDOMAN WAWANCARA (WARGA MASYARAKAT)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Husin Potutu
2. Tanggal wawancara : 27 Maret 2024
3. Jenis Kelamin : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir : SD

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia? Bagaimanakah peran bapak dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Sejauhmana partisipasi bapak/ibu dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu? Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah masyarakat di Desa Taluduyunu dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan? Bagaimanakah peran bapak/ibu dalam proses evaluasi pembangunan?

JAWABAN

1. Saya sering dipanggil dalam pembangunan di Desa Taluduyunu. Membantu mengerjakan pembangunan.
2. Saya selalu biasa ikut membantu dalam proses pembangunan infrastruktur Desa Taluduyunu, berupa tenaga dan biaya pembangunan seadanya. Tapi, saya juga pernah tidak ikut berpartisipasi karena kurang setuju dengan cara pemerintah desa dalam menyelesaikan pembayaran kompensasi tanah warga yang dijadikan jalan desa. Waktu itu, salah satu saudara kami, tanahnya dijadikan jalan desa, tetapi sampai pelaksanaan pembangunan jalan desa, pembayaran ganti rugi tanah, belum selesai. Jadi sebenarnya warga masyarakat mendukung pembangunan jalan desa karena keberadaan jalan

desa tersebut akan dinikmati oleh warga desa sendiri, tapi kalau tanah mereka tidak atau kurang diberi kompensasi yang pantas, tentu mereka tidak peduli dengan kegiatan pembangunan jalan desa tersebut.

3. Iya, masyarakat dilibatkan. Peran saya, hanya membantu mengerjakan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

PEDOMAN WAWANCARA (WARGA MASYARAKAT)

I. Identitas Informan

1. Nama informan : Ilyas Yusuf
2. Tanggal wawancara : 30 Maret 2024
3. Jenis Kelamin : (Laki-laki)
4. Pendidikan Terakhir : SLTP

II. Daftar pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia? Bagaimanakah peran bapak dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu?
2. Sejauhmana partisipasi bapak/ibu dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu? Partisipasi apa sajakah yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Taluduyunu?
3. Apakah masyarakat di Desa Taluduyunu dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan? Bagaimanakah peran bapak/ibu dalam proses evaluasi pembangunan?

JAWABAN

1. Saya sering dilibatkan dalam pembangunan di desa taluduyunu. Saya masyarakat yang selalu mendukung perkembangan yang dilakukan.
2. Saya membantu menentukan arah dan orientasi pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan desa. Bentuk keikutsertaan kami selaku warga masyarakat yakni bergotong royong, membantu anggaran bagi warga yang mampu dan solusi yang diberikan untuk pembangunan jalan yang diinginkan. Tapi untuk pembangunan jalan desa baru-baru ini, saya kurang berpartisipasi karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan.
3. Iya, masyarakat dilibatkan dengan cara memberikan tanggapan mengenai keberadaan jalan desa, apakah baik untuk digunakan dan bagaimana dengan

kualitas jalan desa, apakah bisa digunakan dalam jangka panjang atau cepat rusak. Yang jelas bahwa semua jalan desa yang dibangun dapat memberikan manfaat kepada saya karena dapat mempermudah pengangkutan hasil pertanian, hanya saja kualitas jalan desa yang harus lebih diperhatikan lagi karena ada jalan desa yang cepat rusak.



Dokumentasi masyarakat tanggal 25, maret 2024 (Musa Tantu)



dokumentasi tokoh masyarakat tanggal, 21, maret 2024



Dokumentasi ketua PBD /Tanggal, 20 maret 2024



Dokmentasi masyarakat ilyas yusuf/ tanggal 30 maret 2024



Dokumentasi Masyarakat sumarno Husain/ Tanggal, 25 maret 2024



Dokumentasi kepala desa/ tanggal 20 maret 2024



Dokuemtasi masyarakat husin potutu/ Tanggal 27 maret 2024



Dokumentasi jalan



Dokumentasi jalan



Dokumentasi jalan



Dokumentasi jalan



Similarity Report ID: old.25211:58389097

PAPER NAME

SKRIPSI ABDURRAHMAN YUSUF (1)CEK.
doc

AUTHOR

ABDULRAHMAN YUSUF

WORD COUNT

11314 Words

CHARACTER COUNT

80621 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

307.5KB

SUBMISSION DATE

Apr 29, 2024 9:17 AM GMT+7

REPORT DATE

Apr 29, 2024 9:19 AM GMT+7

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.go.id

Nomor : 5080/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tuluduyunu

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Abdul Rahman Yusuf

NIM : S2117177

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA TULUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA
KABUPATEN POHUWATO

Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA TULUDUYUNU KECAMATAN
BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.


 Universitas Ichsan Gorontalo
 Ketua
 Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN 0929117202
 06 Maret 2024



**PEMERINTAH KABUP ATEN POHUWATO
KE CAMATAN BUNTULIA
DESA TALUDUYUNU**

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 490 / SK / DTL - BTLA / 249 / IV / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Adalah PJ. Kepala Desa Taluduyunu Menerangkan, Bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosiasl Dan Politik Univertitas Ichsan Gorontalo

Nama : DIRMAN RABIASA
Jabatan : Pj. Kepala Desa
Alamat : Desa Taluduyunu Kcc. Buntulia Kab. Pohuwato

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : ABDUL RAHMAN YUSUF
NIK : 7504041309970003
NIM : S2117177
TTL : Marisa, 13 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Taluduyunu, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari Tanggal 20 - 25 Maret di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia untuk menyusun Skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan, di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato .

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Taluduyunu, 30 April 2024
Mengetahui
Pj. Kepala Desa Taluduyunu


DIRMAN RABIASA
Nip. 196611232009061001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
 Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
 Nomor : 056/FISIP-UNISAN/S-BPV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
 NIDN : 0926096601
 Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : ABDUL RAHMAN YUSUF
 NIM : S2117177
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 27% berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Dekan,


Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
 NIDN. 0913027101

Gorontalo, 23 Mei 2024

Tim Verifikasi,


Purwanto, S.IP.,M.Si
 NIDN. 0926096601

Tersampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin
 DF

RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Rahman Yusuf
NIM : S2117177
Tempat /Tgl Lahir : Marisa 13 September 1997
Nama Ayah : Ilyas Yusuf
Nama Ibu : Rawati Tantu
Alamat : Dusun Motoduto Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia kab. Pohuwato
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Taluduyunu
 Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato



SEKOLAH	MASUK/LULUS
SDN IMPRES TALUDUYUNU	2004-2010
SMP NEGERI 1 BUNTULIA	2010-2014
SMA NEGERI 1 MARISA	2014-2017
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	2017-2024